



Perubahan Rencana Kerja

2022



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA**

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Telp. 0264-8224794 Purwakarta 41115

**PERATURAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022

KEPALA DINAS,

- Menimbang :
- a. bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, pembangunan, pelaksanaan dan pengawasan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah, dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Kerja (Renja SKPD) sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2022, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (BNRI Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakartadan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 104, TLNRI Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LNRI Tahun 2007 Nomor 67, TLNRI Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LNRI Tahun 2011 Nomor 82, TLNRI Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2014 nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI 5679)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (LNRI Tahun 2208 Nomor 21, TLNRI Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;

16. Peraturan Bupati Nomor 247 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja DPMPTSP Tahun 2022 adalah Dokumen Perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk periode 3 (tiga) bulan yang dimulai pada tanggal 1 Oktober 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) bulan yang dimulai tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Pasal 2

Perubahan Renja DPMPTSP Tahun 2022 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan berpedoman pada RKPD 2022.

Pasal 3

Perubahan Renja DPMPTSP Tahun 2022 disusun dengan sistematika uraian sebagai berikut :

- a. Pendahuluan
- b. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun lalu
- c. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
- d. Penutup

Pasal 4

Uraian Perubahan Renja DPMPTSP Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 5

Perubahan Renja DPMPTSP Tahun 2022 berfungsi sebagai :

1. Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2022;
3. Pedoman dalam pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pembangunan.

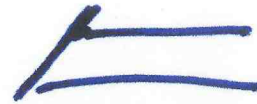
Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta

Tanggal : September 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP. 19790605 200501 1 013





KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan karuniaNya, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 telah kami selesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018- 2023 sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) ini dapat bermanfaat, akhirnya kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas seluruh bantuannya dalam penyelesaian penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022.

Purwakarta, September 2022

 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP.19790605 200501 1 013

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR	(i)
DAFTAR ISI	(ii)
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	
2.1 Reviuw Terhadap Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP	7
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
3.1 a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	24
3.2 b. Program Promosi Penanaman Modal	24
3.3 c. Program Pengendalia Pelaksanaan Penanaman Modal	25
3.4 d. Program Pelayanan Penanaman Modal	26
3.5 e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	27
BAB IV PENUTUP	(iii)





BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun setelah disesuaikan dengan program, kegiatan dan anggaran pada perubahan APBD tahun 2022. Perubahan Rencana Kerja Daerah merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja juga didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018- 2023. Dengan adanya acuan diatas, perubahan rencana kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya Perubahan Renja diharapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.

Sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan



Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap SKPD harus menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja merupakan dokumen perencanaan SKPD satu tahunan sebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis (Renstra), digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD oleh Bappelitbangda dalam pelaksanaan pembangunan satu tahunan daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dalam pelaksanaan program kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2022.

Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2022, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu “ Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif “ serta mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta yaitu **“Mewujudkan Purwakarta Istimewa”** dengan lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan Perubahan atas dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.



1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
- 14) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 15) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 172 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas Dan Fungsi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 16) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 17) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 18) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 247 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
- 19) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.



1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dimaksudkan sebagai arah dan pedoman pelaksanaan perubahan program dan kegiatan dalam tahapan perubahan Tahun 2022 sesuai hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 ini adalah untuk :

- 1) Mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP sampai dengan triwulan II Tahun 2022;
- 2) Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
- 3) Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
- 4) Meningkatkan pelayanan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah; dan
- 5) Mewujudkan sinkronisasi antara substansi dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 dengan dokumen Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 disusun sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022
 - 2.1 Review Terhadap Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kab. Purwakarta Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022
- BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KABUPATEN PURWAKARTA
- BAB IV PENUTUP





BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1. **Reviuw Terhadap Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kab. Purwakarta Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penanaman modal berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 172 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas Dan Fungsi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menetapkan tujuan perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2018-2023 yaitu “ **Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif** “. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, DPMPTSP Kabupaten Purwakarta didukung oleh 2 (dua) Sasaran yaitu :

Sasaran Pertama,

Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN.

Indikator : Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN. Dengan target kinerja pada Tahun 2022 adalah sebesar 70 Triliun(Akumulasi).

Sasaran Kedua,

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan.

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat. Dengan target kinerja pada Tahun 2022 adalah sebesar 82,45.



Adapun pencapaian atas target kinerja dan keuangan DPMPTSP Kabupaten Purwokarta sampai dengan Triwulan II pada Tahun 2022, diuraikan pada tabel berikut:

PERUBAHAN BENJA TAHUN 2022



Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pada Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Triwulan 2 Tahun 2022

Kode	Perangkat Daerah/Bidang Urusan Program/Kegiatan	Indikator (sesuai RPJMD dan DPA)	APBD Tahun 2022 (sesuai DPA)		Lokasi	Realisasi Triwulan 2 Tahun 2022		Selisih		Catatan Permasalahan	
			Target	Pagu Indikatif		Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Pagu		%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (6-9)	11	12
2.18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				13.179.834.825			4.610.197.309	8.569.637.516	34,98	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				11.786.514.725			4.454.122.262	7.332.392.463	37,79	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Kab.Purwakarta	100%	85.437.000	Kab.Purwakarta	100,0%	16.326.000	69.111.000	19,11	
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Kab.Purwakarta	100%	20.010.400	Kab.Purwakarta	100,0%	8.302.000	11.708.400	41,49	



2.18.01. 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100,0%	8.024.000	104.050	98,72
2.18.01. 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100,0%	-	57.298.550	-
2.18.01. 2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100,0%	2.897.821.426	4.542.864.829	38,95
2.18.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100,0%	2.897.821.426	4.522.864.829	39,05
2.18.01. 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100,0%	-	10.000.000	-



2.18.01. 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Kab. Purwakarta	100,0%	10.000.000	-	10.000.000	-
2.18.01. 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3	Kab. Purwakarta	100%	16.599.296	6.659.200	9.940.096	40,12
2.18.01. 2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Kab. Purwakarta	100%	-	-	-	-
2.18.01. 2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Kab. Purwakarta	100%	16.599.296	6.659.200	9.940.096	40,12
2.18.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4	Kab. Purwakarta	100%	80.000.000	-	80.000.000	-

PERUBAHAN BENJA TAHUN 2022



2.18.01. 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Capaian SAKIP Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100,0%	-	-	-	-
2.18.01. 2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Capaian SAKIP Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100,0%	80.000.000	-	80.000.000	-
2.18.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	Capaian SAKIP Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100%	641.038.650	262.127.336	378.911.314	40,89
2.18.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Capaian SAKIP Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100,0%	50.000.000	29.966.000	20.034.000	59,93
2.18.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Capaian SAKIP Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100,0%	60.038.750	15.913.450	44.125.300	26,51



2.18.01. 2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Kab. Purwakarta	100,0%	25.000.000	Kab. Purwakarta	100,0%	-	25.000.000	-
2.18.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6	Kab. Purwakarta	100,0%	255.218.450	Kab. Purwakarta	100%	-	255.218.450	-
2.18.01. 2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Kab. Purwakarta	100,0%	-	Kab. Purwakarta	100,0%	-	-	-
2.18.01. 2.07.05	Pengadaan Mebel (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Kab. Purwakarta	100,0%	152.290.950	Kab. Purwakarta	100,0%	-	152.290.950	-
2.18.01. 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Kab. Purwakarta	100,0%	102.927.500	Kab. Purwakarta	100,0%	-	102.927.500	-

PERUBAHAN BENJA TAHUN 2022



2.18.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100,0%	2.462.935.074	Kab. Purwakarta	100%	1.176.916.606	1.286.018.468	47,79
2.18.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100,0%	7.000.000	Kab. Purwakarta	100,0%	3.900.000	3.100.000	55,71
2.18.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100,0%	608.391.850	Kab. Purwakarta	100,0%	209.506.639	398.885.211	34,44
2.18.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100,0%	1.847.543.224	Kab. Purwakarta	100,0%	963.509.967	884.033.257	52,15
2.18.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100,0%	804.600.000	Kab. Purwakarta	100%	94.271.694	710.328.306	11,72



'2.18.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100,0%	150.000.000	Kab. Purwakarta	100,0%	60.431.694	89.568.306	40,29
'2.18.01. 2.09.05	Pemeliharaan Mebel (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100,0%	30.000.000	Kab. Purwakarta	100,0%	-	30.000.000	-
'2.18.01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100,0%	74.600.000	Kab. Purwakarta	100,0%	33.840.000	40.760.000	45,36
'2.18.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100,0%	400.000.000	Kab. Purwakarta	100,0%	-	400.000.000	-
'2.18.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100,0%	150.000.000	Kab. Purwakarta	100,0%	-	150.000.000	-
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				99.989.800			17.936.870	82.052.930	17,94

PERUBAHAN BENJA TAHUN 2022



2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	9	Jumlah Minat Penanaman Modal	Kab.Purwakarta	100,0%	49.989.900	Kab.Purwakarta	100,0%	16.599.870	33.390.030	33,21
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Jumlah Minat Penanaman Modal	Kab.Purwakarta	100,0%	49.989.900	Kab.Purwakarta	100,0%	16.599.870	33.390.030	33,21
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	10	Jumlah Minat Penanaman Modal	Kab.Purwakarta	100,0%	49.999.900	Kab.Purwakarta	100,0%	1.337.000	48.662.900	2,67
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Jumlah Minat Penanaman Modal	Kab.Purwakarta	100,0%	49.999.900	Kab.Purwakarta	100,0%	1.337.000	48.662.900	2,67
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					199.950.000			58.677.500	141.272.500	29,35
2.18.02.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	11	Jumlah Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	Kab.Purwakarta	100,0%	199.950.000	Kab.Purwakarta	100,0%	58.677.500	141.272.500	29,35
2.18.02.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Jumlah Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	Kab.Purwakarta	100,0%	50.985.000	Kab.Purwakarta	100,0%	48.050.000	2.935.000	94,24
2.18.02.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Jumlah Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	Kab.Purwakarta	100,0%	148.965.000	Kab.Purwakarta	100,0%	10.627.500	138.337.500	7,13
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					299.986.500			11.825.487	288.161.013	3,94

PERUBAHAN BENJA TAHUN 2022

2.18.04. 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	12	Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diselesaikan; Nilai Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Purwakarta	100,0%	11.825.487	288.161.013	3,94
2.18.04. 2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diselesaikan; Nilai Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Purwakarta	100,0%	11.240.787	88.752.863	11,24
2.18.04. 2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diselesaikan; Nilai Pencapaian IndeksKepuasan Masyarakat	Kab. Purwakarta	100,0%	584.700	39.415.300	1,46
2.18.04. 2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diselesaikan; Nilai Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Purwakarta	100,0%	-	109.999.600	-
2.18.04. 2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diselesaikan; Nilai Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Purwakarta	100,0%	-	49.993.250	-



2.18.06. 2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan	Kab. Purwakarta	100%	399.999,800	Kab. Purwakarta	100,0%	67.635.190	332.364.610	16,91	
---------------------	---	--	--	-----------------	------	-------------	-----------------	--------	------------	-------------	-------	--



Dari Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022, DPMPTSP melaksanakan 6 program dengan 14 kegiatan dan 41 Sub Kegiatan dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. **13.179.834.825,-**. Kemudian pada Pagu Anggaran Parsial 1 berubah menjadi 6 program dengan 14 kegiatan dan 40 Sub Kegiatan dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. **13.179.834.825,-**. Kemudian terjadi pergeseran lagi pada Parsial 3 menjadi 6 program dengan 14 kegiatan dan 40 Sub Kegiatan dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp 13.288.076.369,- .

Adapun sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, realisasi terhadap pencapaian target keuangan DPMPTSP mencapai **34.98%** atau sebesar **Rp. 4.610.197.309**. Hal ini disebabkan adanya kegiatan yang belum terealisasi anggarannya namun sebagian kegiatan juga sudah mulai dilaksanakan secara fisik dan kinerjanya, namun masih dalam proses pengajuan pencairan di Pejabat Penatausahaan Keuangan internal DPMPTSP Kabupaten Purwakarta.



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA DPMPTSP KABUPATEN PURWAKARTA

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan.

Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dan dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan. Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program.

Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya.

Adapun program dan kegiatan prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta pada parsial 3 Tahun 2022 telah sesuai dengan program

prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Purwakarta dan Rencana Strategis Tahun 2018-2023.

Rincian program dimaksud sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Adapun kegiatan yang mendukung pencapaian Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah :

- 1) Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, bertujuan untuk menganalisis fasilitas atau insentif apa saja yang dapat diberikan kepada investor yang menjadi kewenangan daerah. Fasilitas / insentif merupakan suatu daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Purwakarta daripada daerah lain, dapat berupa kemudahan perizinan, keringanan pajak / retribusi daerah, fasilitasi permasalahan penanaman modal dan sebagainya.
- 2) Kegiatan Penyediaan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang profil investasi di Kabupaten Purwakarta dalam bentuk dokumen/buku serta dapat dijadikan bahan acuan para investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Purwakarta.
- 3) Kegiatan Penyelenggaraan Gerai Pelayanan Publik (GPP) Teras Madukara di kecamatan jatiluhur. Teras Madukara bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang tersebar di seluruh Kabupaten Purwakarta, antara lain layanan perizinan berusaha, layanan dokumen kependudukan dan sidang *online*.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Adapun kegiatan yang mendukung pencapaian Program Promosi Penanaman Modal

adalah :

- 1) Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal, bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap metode dan cara yang paling efektif dan efisien dalam melakukan promosi penanaman modal, terutama pada saat pandemi Covid-19.
- 2) Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota, bertujuan untuk memperkenalkan potensi dan peluang investasi yang ada di Kabupaten Purwakarta. Dengan jadwal event pameran diluar kota yaitu di Yogyakarta, oleh karena itu pelaksanaan promosi dilakukan di Lapak Prestasi MPP Bale Madukara.

c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Adapun Kegiatan yang mendukung pencapaian Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah :

- 1) Pembinaan dan Pemantauan Penanaman Modal Asing (PMA) and Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mengawasi pelaksanaan realisasi penanaman modal PMA dan PMDN selama beroperasi di wilayah Kabupaten Purwakarta, melalui tinjauan langsung dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) perusahaan sehingga tersedia data investasi yang akurat sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan yang tepat di masa yang akan datang dalam rangka memberikan kemudahan dan fasilitasi bagi investor.
- 2) Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan

serta menjadi tolak ukur atas kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP Kabupaten Purwakarta.

- 3) Penanganan Pengaduan Perizinan, kegiatan ini dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat adanya pengaduan dari masyarakat tentang perizinan beserta dampaknya.
- 4) Pengawasan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan, kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mengawasi pelaksanaan atas permohonan pembuatan perizinan dan non perizinan, kesesuaian antara jenis izin yang dimiliki oleh perusahaan dengan pelaksanaan di lapangan serta batas kadaluarsa dari izin yang dimiliki oleh suatu perusahaan.
- 5) Pemutakhiran Database Perizinan Pemanfaatan Tata Ruang, merupakan kegiatan pendataan atas izin pemanfaatan ruang di Kabupaten Purwakarta serta pemantauan terhadap aspek legalitas lainnya yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatannya di lapangan.

d. Program Pelayanan Penanaman Modal

Adapun Kegiatan yang mendukung pencapaian Program Pelayanan Penanaman Modal antara lain :

- 1) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memantau dan membahas pelaksanaan proses pemenuhan komitmen perizinan berusaha maupun non perizinan berusaha.

- 2) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan layanan “jemput bola” penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) sampai tingkat desa, diutamakan bagi Usaha Mikro dengan nilai investasi sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diluar tanah dan bangunan.
- 3) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan, kegiatan ini bertujuan untuk memastikan layanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat berjalan sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria. Selain itu disediakan pula sarana pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan, baik secara *online* maupun *offline*, sebagai sarana evaluasi dan pengendalian terhadap kualitas layanan yang diberikan.
- 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan minat investasi di Kabupaten Purwakarta, dalam kegiatan ini diidentifikasi kriteria-kriteria pelaku usaha yang dapat diberikan kemudahan, fasilitas, maupun insentif penanaman modal.

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Adapun Kegiatan yang mendukung pencapaian Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal antara lain :

- 1) Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan, dalam rangka memberikan pedoman yang jelas bagi setiap prosedur pelayanan perizinan dan

sinkronisasi peraturan dari pusat maupun yang ada di daerah tentang pelayanan perizinan dan non perizinan.

- 2) Penyusunan Pelaporan Perizinan dan Non Perizinan, bertujuan untuk memberikan data yang akurat, lengkap dan tepat waktu terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan.
- 3) Alih Media Arsip Perizinan, merupakan kegiatan konversi arsip perizinan dari bentuk fisik menjadi bentuk digital (pdf), bertujuan untuk memberikan solusi terhadap keterbatasan ruangan arsip dan untuk mempermudah serta mempersingkat waktu proses pencarian arsip apabila diperlukan.
- 4) Fasilitasi Penyerapan Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, merupakan kegiatan pemantauan atas kewajiban pemenuhan retribusi oleh pemohon perizinan yang dokumen izinnya belum dibayarkan.
- 5) Pengembangan Sistem Informasi Perizinan *Online*, merupakan kegiatan interoperabilitas sistem perizinan pada DMPTSP Kabupaten Purwakarta dengan sistem pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta, dilakukan secara *host to host* dengan nama aplikasi SiKasep Pasti. Aplikasi tersebut memastikan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah (KSWPD) telah terpenuhi sebelum pemohon menerima pelayanan publik berupa pelayanan perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP Kabupaten Purwakarta.

Dari kelima Program sebagaimana tersebut, pada parsial 3 Tahun anggaran 2022 terdapat selisih berupa penambahan sebesar Rp. 108.241.544,- diuraikan pada tabel berikut



Matriks Program dan Kegiatan Parsial III DPMPSTP Kabupaten Purwakarta
Tahun Anggaran 2022

Kode	Perangkat Daerah/Bidang Urusan Program/Kegiatan	Indikator (sesuai RPJMD dan DPA)	APED MURNI Tahun 2022 (sesuai DPA)		Lokasi	APED PARSIAL III Tahun 2022 (sesuai DPA)		Catatan Permasalahan	
			Target	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
2.18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				13.179.834.825			13.288.076.369	108.241.544
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				11.786.514.725			11.894.756.269	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Kab. Purwakarta	100%	85.437.000	Kab. Purwakarta	100,0%	85.437.000	
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Kab. Purwakarta	100%	20.010.400	Kab. Purwakarta	100,0%	20.010.400	



2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100%	8.128.050	Kab. Purwakarta	100,0%	8.128.050
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100%	57.298.550	Kab. Purwakarta	100,0%	57.298.550
2.18.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100%	7.440.686.255	Kab. Purwakarta	100,0%	7.440.686.255
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100%	7.420.686.255		100,0%	7.420.686.255
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu)		Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100%	10.000.000	Kab. Purwakarta	100,0%	10.000.000

2.18.01.2.02.07	Terpadu Satu Pintu)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan B ulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD(Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Kab. Purwakarta	100%	100%	10.000.000	Kab. Purwakarta	100,0%	10.000.000	
2.18.01.2.03	Terpadu Satu Pintu)	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta	100%	100%	16.599.296	Kab. Purwakarta	100%	16.599.296	6.559.200
2.18.01.2.03.02	Terpadu Satu Pintu)	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Kab. Purwakarta	100%	100%	-	Kab. Purwakarta	100,0%	-	
2.18.01.2.03.05	Terpadu Satu Pintu)	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Kab. Purwakarta	100%	100%	16.599.296	Kab. Purwakarta	100,0%	16.599.296	16.599.296



2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4	Capaian SAKIP Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100%	80.000.000	Kab. Purwakarta	100,0%	80.000.000
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Capaian SAKIP Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100%	-	Kab. Purwakarta	100,0%	-
2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Capaian SAKIP Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100%	80.000.000	Kab. Purwakarta	100,0%	80.000.000
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	Capaian SAKIP Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100%	641.038.650	Kab. Purwakarta	100%	641.038.650
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Capaian SAKIP Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100%	50.000.000	Kab. Purwakarta	100,0%	50.000.000



2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Kab. Purwakarta	100,0%	60.038.750	Kab. Purwakarta	100,0%	60.038.750	
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Kab. Purwakarta	100,0%	250.000.000	Kab. Purwakarta	100,0%	250.000.000	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Kab. Purwakarta	100,0%	99.999.900	Kab. Purwakarta	100,0%	99.999.900	
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Kab. Purwakarta	100,0%	6.000.000	Kab. Purwakarta	100,0%	6.000.000	
2.18.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Kab. Purwakarta	100,0%	50.000.000	Kab. Purwakarta	100,0%	50.000.000	



2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100,0%	100.000.000	Kab. Purwakarta	100,0%	100.000.000	
2.18.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100,0%	25.000.000	Kab. Purwakarta	100,0%	25.000.000	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100,0%	255.218.450	Kab. Purwakarta	100%	255.218.450	
2.18.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100,0%	-	Kab. Purwakarta	100,0%	-	
2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100,0%	152.290.950	Kab. Purwakarta	100,0%	152.290.950	



2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100,0%	102.927.500	102.927.500	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100,0%	2.462.935.074	2.462.935.074	
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100,0%	7.000.000	7.000.000	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100,0%	608.391.850	608.391.850	
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100,0%	1.847.543.224	1.955.784.768	108.241.544



'2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100,0%	804.600.000	Kab. Purwakarta	100%	804.600.000
'2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100,0%	150.000.000	Kab. Purwakarta	100,0%	150.000.000
'2.18.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100,0%	30.000.000	Kab. Purwakarta	100,0%	30.000.000
'2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100,0%	74.600.000	Kab. Purwakarta	100,0%	74.600.000



2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Daerah, Persentase Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100,0%	400.000.000	Kab. Purwakarta	100,0%	400.000.000
2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Daerah, Persentase Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab. Purwakarta	100,0%	150.000.000	Kab. Purwakarta	100,0%	150.000.000
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				99.989.800			99.989.800
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	9 Jumlah Minat Penanaman Modal	Kab. Purwakarta	100,0%	49.989.900	Kab. Purwakarta	100,0%	49.989.900
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Jumlah Minat Penanaman Modal	Kab. Purwakarta	100,0%	49.989.900	Kab. Purwakarta	100,0%	49.989.900

2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	10	Jumlah Minat Penanaman Modal	Kab. Purwakarta	100,0%	49.999.900	Kab. Purwakarta	100,0%	49.999.900
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Jumlah Minat Penanaman Modal	Kab. Purwakarta	100,0%	49.999.900	Kab. Purwakarta	100,0%	49.999.900
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					199.950.000			199.950.000
2.18.02.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	11	Jumlah Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	Kab. Purwakarta	100,0%	199.950.000	Kab. Purwakarta	100,0%	199.950.000
2.18.02.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Jumlah Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	Kab. Purwakarta	100,0%	50.985.000	Kab. Purwakarta	100,0%	50.985.000
2.18.02.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Jumlah Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	Kab. Purwakarta	100,0%	148.965.000	Kab. Purwakarta	100,0%	148.965.000
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					299.986.500	Kab. Purwakarta		299.986.500



2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	12	Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diselesaikan; Nilai Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Purwakarta	100,0%	299.986.500	Kab. Purwakarta	100,0%	299.986.500
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diselesaikan; Nilai Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Purwakarta	100,0%	99.993.650	Kab. Purwakarta	100,0%	99.993.650
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diselesaikan; Nilai Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Purwakarta	100,0%	40.000.000	Kab. Purwakarta	100,0%	40.000.000
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diselesaikan; Nilai Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Purwakarta	100,0%	109.999.600	Kab. Purwakarta	100,0%	109.999.600



2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diselesaikan; Nilai Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Purwakarta	100,0%	49.993.250	Kab. Purwakarta	100,0%	49.993.250
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					393.394.000			393.394.000
2.18.05.2.01	Pengendalian Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	13	Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	Kab. Purwakarta	100,0%	393.394.000	Kab. Purwakarta	100,0%	393.394.000
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	Kab. Purwakarta	100,0%	59.400.000	Kab. Purwakarta	100,0%	59.400.000
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	Kab. Purwakarta	100,0%	241.794.000	Kab. Purwakarta	100,0%	241.794.000
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan		Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	Kab. Purwakarta	100,0%	92.200.000	Kab. Purwakarta	100,0%	92.200.000



	Pelayanan Terpadu Satu Pintu)																						
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL																					399.999.800	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14	Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan	Kab.Purwakarta	100,0%																	399.999.800	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan	Kab.Purwakarta	100%																	399.999.800	





BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 merupakan tindak lanjut atas perubahan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 160 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 disusun berdasarkan pada dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 serta pelaksanaan terhadap hasil evaluasi atas Renja DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Sampai dengan Periode Triwulan II Tahun 2022, yang diharapkan dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal terhadap pencapaian tujuan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta khususnya dan adanya keselarasan serta kesinambungan antara dokumen perencanaan dengan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Purwakarta.

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai acuan dalam pelaksanaan perubahan program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022.

Purwakarta, September 2022

M KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA *pa*


HARIMAN BUDI ANGGORO, ST..MT.
NIP. 19790605 200501 1 013

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2022